

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan tinggi dan negara hukum yang didasari atau berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menimbang “bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, penanggulangan bencana sebagai upaya dalam membantu dan melayani masyarakat yang terkena musibah, penyuluhan tentang bencana, pemeriksaan dan pemantauan terhadap daerah tanggap bencana.

Dalam penjelasan dalam Undang-Undang (Presiden, 2007) dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk perlindungan atas bencana. Perlindungan tersebut diperlukan untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat bahkan dalam pengaturam hukum yang mendukungnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang sering terdampak bencana alam karena letak geografisnya yang berada di wilayah beriklim tropis. Iklim Tropis ini membuat Indonesia dapat memiliki intensitas curah hujan tinggi dan rata-rata suhu. udara yang tinggi. Hal tersebut dapat terbukti

menciptakan ancaman bencana alam yang berbahaya, seperti pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.1 Jumlah Kejadian Bencana Alam di Jawa Timur Tahun 2022-2024**

| No. | Jenis Bencana Alam       | Jumlah Kejadian |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 1.  | Tanah Longsor            | 94              |
| 2.  | Banjir                   | 103             |
| 3.  | Gempa Bumi               | 54              |
| 4.  | Banjir dan Tanah Longsor | 4               |
| 5.  | Abrasi                   | 1               |
| 6.  | Angin Puting Beliung     | 219             |
| 7.  | Gunung Meletus           | 1               |
| 8.  | Kebakaran Hutan          | 39              |
| 9.  | Kekeringan               | 154             |

Sumber: <https://dibi.bnppb.go.id/> , diakses pada 20 Maret 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa bencana alam di Indonesia cukup sering terjadi. Hal ini diakibatkan dari letak geografis Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa dan memiliki iklim tropis sehingga dapat dilihat jika bencana hidrometeorologi di Indonesia juga cukup tinggi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terletak di pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, lempeng benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Di bagian selatan dan timur Indonesia terdapat cincin vulkanik yang dikenal dengan ring of fire yang memanjang dari pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang bagian-bagiannya didominasi oleh pegunungan vulkanik dan dataran rendah fasa lumpur. Akibatnya, Indonesia pun mengalami

bencana alam berupa gunung berapi dan gempa bumi.

Menghadapi hal tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan segala bentuk kebijakan mengenai mitigasi bencana alam baik secara nasional hingga di tingkat daerah. Salah satu langkah pemerintah dalam penanggulangan bencana yang sangat penting adalah menerapkan kebijakan mengenai bencana alam serta memberikan edukasi tentang mitigasi bencana yang merupakan bagian dari penanggulangan prabencana. Kesiapsiagaan bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik dan penyadaran, serta dengan meningkatkan kemampuan mengatasi ancaman bencana. (Ibrahim et al., 2020). Tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi merupakan serangkaian upaya guna mengurangi resiko bencana yang dihadapi baik melalui pembangunan infrastruktur fisik yang baik maupun meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Dalam pasal 6 juga disebutkan mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulanbencana diantaranya:

- a. Mengurangi resiko terjadinya bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan;
- b. Melindungi masyarakat dari dampak bencana
- c. Menjamin penghormatan yang tepat terhadap hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana dan sebagai standar pekerjaan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;

- e. Besaran anggaran penanggulangan bencana dalam APBN;
- f. Menetapkan anggaran penanggulangan bencana sebagai dana cadangan;
- g. Menyimpan catatan/log yang akurat tentang risiko dan dampak bencana.

Indonesia merupakan negara yang selalu mengalami kecenderungan kejadian bencana yang meningkat setiap tahunnya. Kecenderungan kejadian bencana tersebut meningkat karena berbagai macam faktor seperti degradasi lingkungan, pembangunan yang belum berbasis kajian resiko bencana, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi, serta meningkatnya lahan untuk keperluan pembangunan.

“Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan bahwa Bangsa Indonesia menghadapi risiko bencana yang cenderung meningkat. Data BNPB mencatat bahwa 1.835 kejadian bencana terjadi hingga pertengahan Oktober 2017, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 254 jiwa dan jutaan warga menderita akibat bencana. Bencana dapat memperlambat proses pembangunan. Sementara itu, angka kemiskinan masih menjadi masalah di seluruh tanah air, apalagi negara merugi rata-rata Rp 30 triliun setiap tahun akibat bencana. Sebagai isu utama penanggulangan bencana di semua tingkatan, Willem menekankan pentingnya kapasitas dan kompetensi BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta semua pihak yang bertanggung jawab menghadapi tugas tersebut.” (sumber: <https://bpbd.bogorkab.go.id/lima-tantangan-penanggulangan-bencana-kini/>, diakses 14 Januari 2023).

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tantangan utama pemerintah Indonesia adalah mengenai lambatnya proses pembangunan nasional serta memiliki dampak kerugian besar yang diakibatkan oleh bencana. Oleh sebab itu, BNPB dan BPBD serta semua pihak yang berkepentingan harus mengutamakan kapabilitas dan kapasitas terkait tuntutan tugas karena kedua badan pemerintah tersebut merupakan *focal point* terkait penanggulangan bencana. Dikutip dari

website *bnpb.go.id*, berbagai kejadian bencana di tanah air memiliki dampak nyata yang dapat mengganggu proses pembangunan nasional. Dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 dibahas secara komprehensif mengenai fokus capaian tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan fokus capaian terkait bencana harus diturunkan hingga level daerah. BNPB Indonesia juga telah men-sosialisasikan integrasi dokumen penanggulangan bencana kepada Kementerian, TNI, hingga pemerintah daerah dengan harapan dokumen integrasi tersebut dapat menjadi pedoman nasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangi bencana dan memenuhi hak masyarakat yang terdampak bencana sebagaimana tercantum dalam (Presiden, 2007). Dengan hal tersebut, pemerintah kini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi dalam penyediaan informasi publik yang dituntut menjadi lebih baik. dan penanggulangan bencana. Hal ini membuat *e-government* atau *e-government* semakin bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Pemerintah tradisional, dengan administrasi dan sastranya, mulai ditinggalkan. Transformasi pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan elektronik (*e-government*) merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam kebijakan publik saat ini.

Kemudian menurut (Nugraha, 2018) pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (*Detiknas*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang salah

satu tugasnya untuk mempercepat pelaksanaan *E-Government*. Sejak dicanangkannya INPRES nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan rencana pengembangan *e-government*, pemerintah akan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan pelayanan publik berbasis *e-government*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik yang lebih bergantung pada *good governance*. Penyiapan sumber daya manusia, peraturan, anggaran, peralatan dan fasilitas merupakan faktor mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan *e-government*. Salah satu tujuan penerapan *e-government* adalah agar instansi pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

**Tabel 1.2 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023**

| No | Jenis Kejadian Bencana Alam | Jumlah Kejadian |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Banjir Genangan             | 9               |
| 2. | Banjir ROB                  | 0               |
| 3. | Kebakaran Lahan             | 549             |
| 4. | Angin Puting Beliung        | 0               |
| 5. | Angin Kencang               | 18              |

Sumber:

[https://sigap.sidoarjokab.go.id/images/foto\\_infografis/Infografis Tahunan Update Des 2022.jpg](https://sigap.sidoarjokab.go.id/images/foto_infografis/Infografis_Tahunan_Update_Des_2022.jpg) , diakses pada 29 Januari 2024

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten yang secara geografis berupa kawasan delta. Delta secara geografis diartikan sebagai daratan yang Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota Delta karena di Kabupaten Sidoarjo terdapat dua sungai besar pecahan dari Sungai Brantas yakni Sungai Mas dan Sungai Porong. Jika ditinjau berdasarkan letak geografis, Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang rawan bencana banjir. Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk serta arus

urbanisasi di Kabupaten Sidoarjo menjadikan Kabupaten Sidoarjo minim lahan untuk membentuk jalur irigasi untuk menampung air saat curah hujan tinggi. Selain itu banyak pintu air/bendungan (DAM) sungai yang kondisinya rusak tidak dapat di operasikan.

“Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) akan menetapkan tiga desa di Kecamatan Taman masing-masing Desa Tanjungsari, Pertapan Maduretno dan Krembangan menjadi daerah rawan bencana banjir karena dilalui Kali Mas. Bupati muda itu juga mengecek pintu air yang salurannya terhubung langsung antara Kali Mas dengan rumah-rumah penduduk. Gus Muhdlor mendapati ada 28 pintu air atau DAM yang kondisinya sudah rusak yang menjadi salah satu penyebab tidak berfungsinya penahan air di saat Kali Mas airnya meluap.” (sumber: <https://jatim.antaranews.com/berita/583993/bupati-sidoarjo-tetapkan-tiga-desa-daerah-rawan-banjir> , diakses 14 Januari 2023)

Berdasarkan berita tersebut, rusaknya pintu air/bendungan (DAM) yang terhubung dengan Sungai Mas rusak mengakibatkan banjir di Desa Tanjungsari, Taman. Terlebih lagi pintu air yang terhubung dengan Sungai Mas tersebut dekat dengan rumah-rumah penduduk, akibatnya saat air sungai meluap, wilayah tersebut terdampak banjir hingga setinggi 40-50 centimeter. Terkait hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih perlu menerapkan pembangunan yang baik untuk penanggulangan bencana serta mengurangi resiko dampak dari terjadinya bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan badan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo melalui penyusunan dokumen kajian resiko daerah rawan bencana, menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana, serta Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan,

pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana. Melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo menjadi langkah serius pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai tindakan preventif terhadap bencana. Tujuan disusunnya Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk memperjelas tugas, fungsi dan peran masing-masing lembaga daerah, lembaga vertikal, relawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dan komprehensif. manajemen bencana tujuannya untuk memperjelas penanggulangan Bencana.

Kebijakan Penanggulangan Bencana BPDB Sidoarjo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara lain, Departemen Bidang Pencegahan, Kedaruratan & Logistik, Departemen Pemadam Kebakaran, dan Rehabilitasi & Rekonstruksi. Guna mempermudah akses informasi dan pelaporan bencana bagi masyarakat, BPBD Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau yang disebut dengan *electronic government (e-Government)* dengan meluncurkan aplikasi tanggap bencana Bernama Sidoarjo Tanggap atau yang biasa disebut SIGAP. Dasar penerapan *E-government* tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government pengemban fokus pada pengelolaan strategi pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Kabupaten Sidoarjo memiliki otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah daerah wajib mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, termasuk pengembangan e-Government di daerah, kecuali Kabupaten Sidoarjo.

Dengan visi sejahtera dan progresif, Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai misi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan agile yang meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi, Telematika Dan Sandi Di Kabupaten Sidoarjo tentang Penerapan sistem informasi, telematika dan password di Kabupaten Sidoarjo menjadi landasan penerapan e-Government di Kabupaten Sidoarjo. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, Kabupaten Sidoarjo menciptakan beberapa inovasi baik dalam bentuk *website* maupun aplikasi seperti yang diluncurkan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi SIGAP.



**Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘SIGAP’**

Sumber : Aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘SIGAP’, Tahun 2023

Aplikasi SIGAP (Sidoarjo Tanggap) merupakan aplikasi tanggap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo. Pada aplikasi SIGAP ini masyarakat umum atau masyarakat kabupaten Sidoarjo dapat melakukan pelaporan bencana dengan fitur pelaporan yang ada pada aplikasi. Fitur pelaporan pada aplikasi ini menyediakan format pelaporan yang harus di isi oleh masyarakat yang akan melaporkan informasi bencana antara lain gambar bencana yang dapat diambil oleh perangkat pelapor, nama pelapor, nomor telepon pelapor, lokasi kejadian (didapat dari GPS perangkat pelapor bencana), jenis bencana, keterangan bencana dan keterangan lokasi pelapor (dilokasi atau tidak dilokasi). Selain fitur pelaporan, aplikasi SIGAP dilengkapi dengan fitur tambahan seperti panduan bencana, info cuaca seta berita informasi bencana. Kelebihan dari aplikasi ini adalah menyediakan fitur registrasi khusus untuk relawan dan karyawan BPBD yang akan membantu proses pelaporan

Pada awal kemunculan aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘SIGAP’ ini menjadikan sebuah wadah bagi masyarakat Sidoarjo menjadi tempat Pelaporan untuk Penanggulangan Bencana yang efektif, Efisien serta dapat menghemat waktu guna membuat Pelaporan Bencana dapat melalui melalui Android masyarakat tersebut. Sehingga dari diciptakan Aplikasi SIGAP ini masyarakat dapat merasakan efek yang baik dari Aplikasi tersebut.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berupaya merespon cepat kejadian bencana dengan meluncurkan Sigap (Sidoarjo Tanggap), sebuah sistem informasi bencana berbasis android. Melalui aplikasi Sigap, warga juga bepeluag melaporkan kejadian bencana secara langsung ke BPBD semisal peristiwa kebakaran.”  
<https://bpbd.sidoarjokab.go.id/artikel-846.html> - Diakses pada 27 Febuari 2023

Seiring berjalannya waktu meluncurnya aplikasi Sigap ini hingga sekarang terdapat beberapa kendala yang dapat diukur melalui Dengan menggunakan teori pengukuran efektivitas aplikasi menurut Delone dan Mclean yang meliputi:

1. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Menurut Delone & McLean (2003) dan Urbach & Mueller (2011) system quality Kualitas kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam suatu sistem informasi Fokus pada kinerja sistem. Hal ini mengacu pada sejauh mana perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam penelitian ini, kualitas sistem mengacu pada keakuratan dan efisiensi Sigap dalam menghasilkan informasi.

2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas informasi merupakan hasil penggunaan suatu sistem informasi oleh penggunanya. Variabel ini mengukur persepsi pengguna terhadap informasi yang diukur berdasarkan keakuratan, relevansi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan format yang mewakili kualitas.

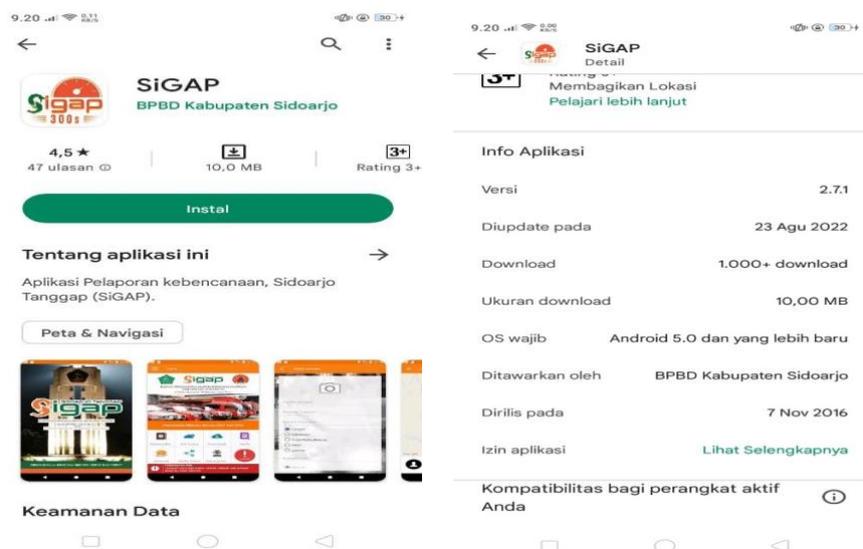
3. Kualitas layanan (*Service quality*)

Kualitas pelayanan suatu sistem informasi merupakan pelayanan yang diterima pengguna dari pengembang sistem informasi. Pelayanan dapat berupa pembaharuan sistem informasi atau respon dari pengembang ketika terjadi masalah pada sistem informasi. Proses implementasi sedang berlangsung untuk mencapai tujuan program.

Sehingga Aplikasi ini tepat dengan tujuan yang ditentukan pada awal terbit dimana Aplikasi aplikasi ini memiliki tujuan menghadirkan kemudahan untuk

masyarakat sidoarjo untuk melakukan pelaporan bencana yang terjadi pada kabupaten sidoarjo dengan menggunakan aplikasi Sigap tersebut. Permasalahan kedua yaitu terkait Sosialisasi tersebut dapat menyebarluaskan informasi terkait Aplikasi Sigap tersebut. Dan informasi terkait Sigap tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat menentukan sasaran peserta program yang ditujuh.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, BPBD Kab Sidoarjo mengalami beberapa kendala seperti,

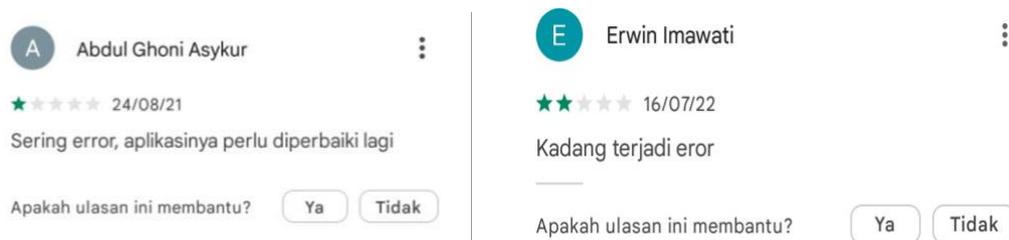


**Gambar 1.2 Aplikasi SIGAP pada playstore**

Sumber : Playstore , Tahun 2023

Pada data Aplikasi Sigap tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Sidoarjo sudah ada 1000+ Masyarakat yang mendownload aplikasi tersebut. Sehingga Aplikasi Sigap ini sudah memberikan kesan yang baik pada masyarakat sehingga banyak yang mendownloadnya. Dari meningkatnya yang telah mendownload aplikasi tersebut menjadikan aplikasi Sigap ini sedikit mendalami kendala aplikasi

SIGAP ini dirasa masih belum mencapai tujuan dan fungsinya menurut ((Rachmawan & Ro'is Abidin, 2022) Hal ini didasari oleh sebagian pengguna aplikasi SIGAP yang masih kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan aplikasi tersebut. selain itu masih banyak fitur-fitur pada aplikasi SIGAP yang tidak sesuai pada tempatnya bahkan tidak dapat diakses sama sekali. seperti,



**Gambar 1 .3 Komentar Masyarakat Pada Laman Aplikasi SIGAP di Playstore**

Sumber : Playstore, Tahun 2023

Selanjutnya seiring berjalannya waktu pihak BPBD Kabupaten Sidoarjo terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum paham akan aplikasi tersebut. Sosialisasi tersebut melalui berbagai platfrom seperti media sosial, berita, hingga informasi yang diunggah melalui website BPBD Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut berisikan tentang penjelasan seputar Sigap manfaat dari Sigap serta keefektivitasan apabila melaporkan menggunakan Sigap tersebut. Meskipun telah melakukan sosialisasi program tersebut ternyata masih banyak masyarakat Sidoarjo yang masih belum paham dan mengerti akan Aplikasi Sigap.



**Gambar 1.4 Sosialisasi Aplikasi SIGAP Pada Laman Berita dan Sosial Media**

Sumber : <http://bpbdsidoarjo.go.id/artikel-850.html> - Diakses 27 Febuari 2023

Aplikasi ini diciptakan agar masyarakat dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi terkait bencana yang terjadi di Sidoarjo. Selain itu diciptakan aplikasi tersebut agar masyarakat melakukan pelaporan bencana menjadi efektif dan efisien. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam menunjang tujuan program ini adalah kurangnya sabar masyarakat dalam menunggu proses peresponan laporan. Hal tersebut menjadikan tujuan program tidak berjalan efektif. Terakhir mengenai pemantauan program sebagai betuk BPBD Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat yang telah menggunakan aplikasi tersebut selalumemberika update mengenai permasalahan yang dilaporkan dan masyarakat bisamelihat pada website <https://bpbdsidoarjo.go.id/histori>. Aplikasi ini dapat membantu masyarakat melakukan pelaporan bencana pada Kabupaten Sidoarjo tanpa mendatangi ke BPBD Kabupaten Sidoarjo.

| No | Kejadian              | Tanggal Laporan                                  | ALAMAT   | STATUS          |
|----|-----------------------|--|--|-----------------|
| 1  | Kekakaran             | Kamis, 16 09:52:31 Februari 2023<br>11:31:49 WIB | Jl. Sultan Agung No.17, Gajah Tunas, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212, Indonesia       | LAPORAN BENCANA |
| 2  | Banjir                | Kamis, 29 18:41:21 Desember 2022<br>11:31:49 WIB | Desa Kalidayu Kecamatan Tanggulangin   | LAPORAN BENCANA |
| 3  | Angin Pating Belahang | Kamis, 29 18:38:48 Desember 2022<br>11:31:49 WIB | Desa Tumbuh Sempu dan Desa Widanganti Kec. Waru  | LAPORAN BENCANA |
| 4  | Angin Pating Belahang | Kamis, 29 18:30:18 Desember 2022<br>11:31:49 WIB | Desa Sulo dan Desa Lela Kecamatan Sidoarjo   | LAPORAN BENCANA |
| 5  | Angin Pating Belahang | Kamis, 29 18:25:19 Desember 2022<br>11:31:49 WIB | Kaberkas Waru Kec. Waru, Desa Sawatray dan Desa Rangah Kec. Gedangan, Desa Kolongrangkring Kec. Jabon                | LAPORAN BENCANA |
| 6  | Banjir                | Kamis, 29 18:18:28 Desember 2022<br>11:31:49 WIB | Kecamatan Kriyan, Kecamatan Parong, Kecamatan Talangan, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi. | LAPORAN BENCANA |

**Gambar 1.5 History Laporan Masyarakat pada Aplikasi SIGAP**

Sumber : <https://bpbd.sidoarjokab.go.id/histori> – Diakses pada 27 Febuari 2023

Berdasarkan aspek keberhasilan suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Merwe dan Bekker (2003:333) tersebut dipilih karena memiliki kesesuaian untuk mengkaji sejauh mana BPBD Kabupaten Sidoarjo menerapkan Efektivitas mengenai aplikasi SIGAP. Oleh karena itu, terkait fenomena dan analisis terkait pemmasalahan yang sudah dijabarkan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘Sigap’ Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sidoarjo ”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian data-data diatas, sekiranya dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Efektifitas Aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘Sigap’ Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Di Kabupaten Sidoarjo?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah “Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Efektifitas Aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘Sigap’ Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Di Kabupaten Sidoarjo ”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teori yang berkaitan dengan Efektifitas aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘SIGAP’ dalam penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sidoarjo kepada masyarakat terutama di kabupaten sidoarjo

#### **2. Manfaat praktis**

##### **A. Bagi Peneliti**

Peneliti dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang Efektifitas Aplikasi Sidoarjo Tanggap ‘Sigap’ Dalam Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Pada Kabupaten Sidoarjo.

##### **B. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan literatur dan referensi di perpustakaan serta dapat dijadikan sebagai kajian untuk penelitian sejenis yang dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

##### **C. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dan saran

bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan Efektifitas Aplikasi Sidoarjo Tanggap 'Sigap' Dalam Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Pada Kabupaten Sidoarjo

